

**SKRIPSI**

**MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA DIPLOMASI SUATU NEGARA  
(STUDI KASUS: PENGGUNAAN TWITTER OLEH PRESIDEN DONALD  
TRUMP DALAM HUBUNGAN DIPLOMASI AS-IRAN)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUH. ARDI  
E 131 16 010**



**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA DIPLOMASI SUATU  
NEGARA (STUDI KASUS : PENGGUNAAN TWITER OLEH  
PRESIDEN DONALD TRUMP DALAM HUBUNGAN  
DIPLOMASI AS-IRAN)

NAMA : MUH. ARDI

NIM : E13116010

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, 7 Januari 2021

Pembimbing I,

**Agussalim, S.IP, MIRAP**  
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,

**Bama Andika Putra, S.IP, MIR**  
NIK. 199112172018073001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196207021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA DIPLOMASI SUATU  
NEGARA (STUDI KASUS : PENGGUNAAN TWITER OLEH  
PRESIDEN DONALD TRUMP DALAM HUBUNGAN  
DIPLOMASI AS-IRAN)

N A M A : MUH. ARDI

N I M : E13116010

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 7 Januari 2021.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Muh. Ardi  
NIM : E131 16 010  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Media Sosial Sebagai Sarana Diplomasi Suatu Negara (Studi Kasus: Penggunaan Twitter Oleh Presiden Donald Trump Dalam Hubungan Diplomasi AS-Iran)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi/tesis/disertasi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain , maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 13 Januari 2021

Yang Menyatakan

  
(Mun. Ardi)

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berkah, dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Media Sosial Sebagai Sarana Diplomasi Suatu Negara (Studi Kasus: Penggunaan Twitter Oleh Presiden Donald Trump Dalam Hubungan Diplomasi AS-Iran)**” sebagai salah satu syarat yang diperoleh guna menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis mengalami berbagai halangan dan rintangan, tetapi dengan motivasi yang tinggi dan usaha serta doa dan semangat dari seluruh pihak yang mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua penulis satu-satunya **St. Arifah**, terima kasih atas dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tiada habis-habisnya sampai saya berada di titik pencapaian ini. Teruntuk kakak pertama penulis **Sulaeman, S.Hum**, terima kasih telah mendukung dan membantu segala keperluan mulai dari saat masa-masa kuliah sampai sekarang ini.

Ucapan terima kasih juga saya haturkan sebesar-besarnya kepada **Bapak H. Darwis, M.A., Ph.D.** selaku ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, dan **Kak Agussalim, S.IP, MIRAP** selaku **Pembimbing I** penulis, serta **Kak Bama Andika Putra, S.IP, MIR** selaku **Pembimbing II** penulis. Terima kasih atas dukungan dan bantuan baik itu kritik dan saran serta motivasi yang membangun selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hubungan Internasional, **Pak Patrice** selaku penasehat akademik penulis, **Pak bur, Pak Ishaq, Pak nasir, Kak Gego, Pak Aspi, Pak Munjin, Kak Sawing, Pak Adi, Kak Aca, serta Ibu Puspa, Ibu Seni, dan Kak Jannah**, terima kasi sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis baik itu dalam proses belajar mengajar maupun di luar dari itu. Untuk Staff di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Kak Rahma, Bu Tia dan Bu Fatma** terima kasih atas bantuan administrasi serta saran-saran yang telah diberikan kepada penulis. **Pak Ridho dan Kak Ita** terima kasih telah berbaik hati dalam membantu segala kebutuhan penulis selama di Departemen. Semoga Bapak dan Ibu serta Kakak-Kakak selalu diberika kesehatan dan kebahagiaan dari Allah SWT.

Selama berkuliah di Ilmu Hubungan Internasional, penulis bertemu dengan banyak teman-teman yang membantu dan menghibur hari-hari penulis, maka dari itu penulis ingin berterima kasih kepada mereka.

1. Teruntuk sahabat yang mewarnai hari-hari perkuliahanku. **Abang Arafah**, yang sudah menjadi kakakku sekaligus jadi ojek pribadiku semasa kuliah, yang selalu aku suruh menunggu depan kelas buat nebeng pulang, yang selalu aku ganggu ketika lagi menyendiri depan kelas, yang selalu neraktir waktu lagi boke, dan selalu menjadi pendengar yang baik kalau aku lagi ngedumel ngga jelas walaupun selalu ngeritik apapun kesalahan yang aku ucapin. Semoga cepet nyelesein studinya dan semoga kita bisa sahabatan sampai akhir hayat.
2. Teruntuk teman kuliah yang selalu bantuin aku ketika lagi butuh-sebutuhnya. **Septi**, yang selalu ada dan selalu beri makanan dan diizinin mampir

di kostannya buat istirahat. **Rivai**, yang selalu ngasi aku duit dan traktir di kantin kampus. **Erwin dan Pak haji**, yang selalu ngajakin sholat dan tarbiyah. **Ifa, Alex, Ikra, dan Riri** yang selalu bantu kalau ada materi kuliah yang tidak kumengerti. **Maya, Tami, Nyunyu** yang selalu bantu kalo ada tugas yang harus di Print. **Ramon dan Farhan**, yang selalu buat jokes di kelas. Dan teruntuk semua teman-teman **GENEVA** yang tidak bisa kusebutkan namanya TERIMA KASIH untuk segalanya.

3. Teruntuk teman SMA yang sampe kuliah masih sama-sama. **Fadli** yang selalu nemenin kalo lagi kosong di kost, yang sering ku temani kekampus kalo tidak di jemput sama **Abang Arafah** dan selalu sama pulang kampung kalo sudah waktu libur.
4. Teruntuk teman KKN yang ngangenin. **Ica, Imma, Didit, Dicky, Amir, Pinke, Canci, Sisil, Vivi, dan Rian** terima kasih atas pengalaman dan drama selama sebulan di posko Samataring, Kec. Sinjai Timur. Semoga kedepannya bisa bertemu lagi .

## ABSTRAK

**Muh. Ardi (E 131 16 010), “Media Sosial Sebagai Sarana Diplomasi Suatu Negara (Studi Kasus: Penggunaan Twitter Oleh Presiden Donald Trump Dalam Hubungan Diplomasi AS-Iran)** di bawah bimbingan **Agussalim, S.IP, MIRAP** selaku pembimbing I, dan **Bama Andika Putra, S.IP, MIR**, selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk diplomasi yang digunakan AS dalam menyelesaikan konflik dengan Iran, serta mengetahui dampak penggunaan diplomasi twitter dalam penyelesaian konflik AS-Iran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Twitter dari Presiden Amerika Serikat yang berkaitan dengan konflik AS-Iran sejak akhir tahun 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literature dan juga berfokus pada Twitter Donald Trump. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan berpacu pada konsep diplomasi digital dan diplomasi publik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Twiplomacy* berperan dalam proses penyelesaian konflik AS-Iran namun tidak secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya cuitan Trump mengenai diplomasi yang ingin dilakukan dengan Iran. Dampak penggunaan *Twiplomacy* oleh Trump membuat popularitasnya menurun baik domestic maupun luar negeri begitu juga dengan elektabilitasnya yang menurun akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Trump dalam menangani masalah ini.

Kata Kunci : *eDiplomacy, AS-Iran, Twiplomacy*

## ABSTRACT

*Muh. Ardi (E 131 16 010), "Social Media As a means of a diplomacy of a country (case study: the use of Twitter by President Donald Trump in the US-Iran diplomacy relations) under the guidance of Agussalim, S.IP, MIRAP as I guidance I, and Bama Andika Putra, S.IP, MIR, as Munts II, on the Department of International Relations, Faculty of Social Sciences and Political Science, Hasanuddin University.*

*This study aims to know the form of diplomacy used by US in resolving conflict with Iran, and know the impact of using Twitter diplomacy in the US-Iran's conflict. The research method used is descriptive qualitative. The object in this study is Twitter from the President of the United States relating to the US-Iran conflict since the end of 2019. Data collection techniques using literature studies and also focus on Twitter Donald Trump. The technical analysis of data using qualitative data analysis by racing on the concept of digital diplomacy and public diplomacy.*

*The results of this study show that Twiplomacy is role in the process of solving the US-Iran conflict but not directly. This is evidenced by the number of Trump's tweet regarding diplomacy to do with Iran. The impact of using twiplomacy by Trump makes its popularity decreased both domestic and abroad as well as its declining electability due to the distrust of society to Trump in addressing this issue.*

*Keywords: e-diplomacy, US-Iran, Twiplomacy*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>12</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	12
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	25
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	26
D. Kerangka Konseptual.....	27
E. Metode Penelitian .....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Konsep Tentang Diplomasi Digital .....	33
B. Konsep Tentang Diplomasi Publik .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>42</b>
A. Awal Ketegangan AS Dan Iran Tahun 2019 .....	42
B. Puncak Konflik Di Awal Tahun 2020 .....	46
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Diplomasi Amerika Serikat dalam Menangani Konflik Iran .....	49
B. Dampak Diplomasi Twitter dalam hubungan Amerika Serikat-Iran .....	70
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan : .....	92
B. Saran : .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	30
------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini kondisi politik internasional diyakini telah mengalami pergeseran menuju era digitalisasi informasi. Dalam konteks hubungan internasional, hal ini mengacu kepada era informasi dan teknologi memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan upaya pencapaian kepentingan nasional tak terkecuali melalui instrumen diplomasi.

Diplomasi antar aktor dalam politik internasional yang semula berfokus pada upaya pencapaian kepentingan nasional melalui cara-cara tradisional - seperti negosiasi formal antar perwakilan negara, tekanan ekonomi dan militer – telah bergeser menjadi diplomasi yang berbasis teknologi dimana upaya pencapaian kepentingan sebuah negara tidak lagi dipengaruhi oleh kekuatan militer dan ekonomi, melainkan dapat dicapai dengan penggunaan teknologi dan informasi.

Perubahan tatanan global ini yang ditandai dengan adanya revolusi teknologi informasi tertentu memiliki konsekuensi penting bagi entitas politik. Terdapat perubahan informasi bagi negara berdaulat yang semula batas-batas / kedaulatan negara ditentukan oleh sistem Westphalia, namun akibat globalisasi yang diakibatkan oleh digitalisasi informasi dan komunikasi, batas-batas negara menjadi bias.

Mansbach dalam tulisannya yang berjudul *International Relation and Information Technology* mengatakan bahwa internet, bersamaan

dengan inovasi lainnya dalam bidang teknologi, telah menurunkan posisi teritori (wilayah) kedaulatan negara dan dengan begitu melemahkan negara dan berkontribusi bagi munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam mendefinisikan “politik” juga dalam menentukan cara/strategi politik yang baru pula. Menurutnya, teknologi informasi telah mengubah *territory* menjadi *post-territory*, sebuah konsepsi bahwa saat ini batas-batas negara tidak lagi ditentukan batasan fisik. (Mansbach, 2016, pp. 1-2)

Dalam konteks hubungan internasional *realpolitik*, sebagaimana diungkapkan oleh Bollier, merupakan tipe diplomasi tradisional yang selama ini umum dilakukan negara-negara di dunia. *Realpolitik* merupakan gaya diplomasi yang mengedepankan kekuatan dalam rangka mencapai kepentingan. Sedangkan kecenderungan pergeseran yang terjadi saat ini adalah munculnya *netpolitik*, yaitu internet untuk mencapai kepentingan, baik kepentingan politik, budaya, maupun upaya mempengaruhi nilai dan identitas personal. (Bollier, 2003, p. 5)

Adapun kecenderungan penggunaan teknologi informasi dalam politik internasional, khususnya diplomasi, dipengaruhi oleh banyak kejadian penting. Dimulai dengan apa yang kita kenal dengan fenomena *CNN Effect*, (Livingston, 1997) dimana situs tersebut menjadi pencetus tayangan langsung tentang isu-isu terbaru yang disiarkan secara terus menerus.

Hal ini ditujukan agar masyarakat mendapatkan informasi sedini mungkin yang tepat dan akurat. Fenomena ini pada akhirnya membawa

pergeseran dalam dunia diplomasi bahwa tayangan televisi dianggap dapat mewakili keingintahuan tentang apa yang terjadi di luar sana tanpa harus bergantung pada siaran atau pertanyaan yang dikeluarkan secara resmi oleh perwakilan suatu negara (kedutaan besar).

Penggunaan teknologi dan informasi juga digunakan tidak hanya isu-isu genting seperti perang ataupun intervensi kemanusiaan, tetapi juga dalam hal-hal yang sifatnya umum seperti keseharian apa yang terjadi pada tahun 2012, ketika Duta Besar Kanada untuk Tiongkok memasang foto kendaraan dinas di situs Weibo, menunjukkan hal tersebut.

kejadian tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat Tiongkok, khususnya terkait dengan kesadaran pejabat pemerintah untuk menggunakan kendaraan yang tidak berlebihan. Selain itu masyarakat Tiongkok juga memuji transparansi yang diperlihatkan oleh pejabat pemerintah Kanada. Dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh pejabat pemerintah Kanada tersebut telah meningkatkan citra baik terkait negaranya. (Desk, 2012)

Selain dua contoh di atas, situs Wikileaks (Assange, 2014) dan juga kejadian *Arab Spring* semakin memperlihatkan pentingnya peranan teknologi dan informasi dalam politik internasional saat ini. Fenomena gerakan-gerakan radikal yang menjalankan pola rekrutmen secara digital yang disampaikan dalam kutipan pada bagian awal, bahwa saat ini penggunaan teknologi dan informasi merupakan hal yang penting dalam politik internasional, dan menjadikan diplomasi tidak lagi hanya bergantung

pada kekuatan militer ataupun luas teritori. Hal tersebut pada akhirnya membawa aktor dalam hubungan internasional, terutama negara, untuk menjalankan bentuk diplomasi yang menekankan pada aspek teknologi dan informasi.

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi khususnya bidang komunikasi dan informasi telah membawa perubahan yang semakin memudahkan penyampaian informasi lintas batas (Funk, 2013). Dampak perkembangan teknologi terhadap diplomasi saat ini menyebabkan terjadinya perpindahan dari kementerian luar negeri ke media sosial seperti Twitter, Facebook dan Youtube yang merujuk pada diplomasi digital (Manor, 2016).

Selama lebih dari dua dekade, diplomasi digital telah menjadi kata kunci dan perbincangan di kalangan praktisi kebijakan luar negeri. Diplomasi digital atau yang juga disebut *e-diplomacy*, *cyber diplomacy*, atau *twiplomacy* (Holmes, Digital Diplomacy: Theory and Practice, 2015) mengarah pada penggunaan web, teknologi komunikasi dan informasi, dan media sosial untuk tujuan aktivitas diplomasi dan kebijakan luar negeri (Sandre, 2013).

Melalui media sosial, kementerian luar negeri dan para diplomat mampu menyelesaikan tugas mereka secara lebih baik. Akun-akun blogger dari jurnalis warga yang berpengaruh di media sosial dapat memberikan informasi yang berguna bagi kementerian luar negeri untuk memahami dengan baik atau memprediksi suatu peristiwa yang terjadi di negara lain.

Media sosial juga bisa menghadirkan negara di dunia internasional. Selain itu, negara juga dapat menggunakan informasi untuk mengelola reputasi mereka secara lebih baik di dunia internasional (Manor, 2016).

Kehadiran media sosial telah dirasakan oleh banyak aktor, termasuk negara. Dewasa ini banyak negara di dunia menggunakan momen dan secara aktif mengejar tujuan kebijakan luar negeri mereka dan menampilkan citra positif dengan membuat laman, blog, dan penggunaan saluran media sosial – Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Weibo, Flickr, Google+, dan lain-lain (Adesina, 2016).

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Burson Dab Marsteller (2013) yang menyatakan bahwa lebih dari tiga perempat pemerintah (termasuk di dalamnya pemimpin negara) memiliki akun di Twitter, termasuk 45 negara Uni Eropa, dan semua negara Amerika Selatan (kecuali Suriname) memiliki akun resmi di Twitter. (Haryanto, 2017)

Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menyadari bahwa penggunaan saluran media sosial dapat menjadi cara untuk mempengaruhi persepsi public (Jiang, 2013, p. 30). Diplomasi digital pertama kali digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai sarana diplomasi publik, namun di tahun 2013 mulai banyak negara yang mengikuti langkah Amerika Serikat (Direct, 2013).

Meskipun tren penggunaan media baru oleh pemerintah Amerika Serikat telah dimulai sejak awal tahun 1990-an, yang pada saat itu internet muncul dan menjadi alat keseharian di dunia bisnis dan rumah. Diskusi

mengenai penggunaan teknologi baru oleh Departemen Luar Negeri sebagai cara untuk memanfaatkan kapasitas internet agar lebih efektif dalam keterlibatannya di dalam masyarakat telah ada sejak satu dekade yang lalu (Dale, 2010, p. 2).

Kemunculan diplomasi digital – penggunaan media sosial oleh kementerian luar negeri- diprakarsai oleh Alec Ross, seorang penasihat senior bidang inovasi Departemen Luar Negeri di bawah kepemimpinan Hillary Clinton yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dari tahun 2009 hingga awal 2013. Ross bertanggung jawab untuk mempromosikan penggunaan media sosial dalam bidang kenegaraan Amerika Serikat. Dirinya berpendapat bahwa proliferasi teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya merubah cara protes sosial, namun juga merujuk kepada munculnya revolusi diplomasi:

Secara tradisional, seruan diplomasi termasuk didalamnya interaksi pemerintah ke pemerintah. Sebagai contoh, yang sebelumnya dari pemerintah ke masyarakat, seperti siaran internasional abad ke-20. Dengan kemajuan pesat penetrasi teknologi *mobile*, namun, saat ini keikutsertaan semakin meningkat dari pemerintah ke masyarakat. Hubungan langsung dari masyarakat ke pemerintah memperkenalkan diplomat untuk bertemu dan berhubungan dengan pendengar non tradisional, dan sebaliknya memperkenalkan masyarakat untuk mempengaruhi pemerintah mereka untuk melakukan hal tertentu yang pada sepuluh tahun yang lalu merupakan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan (Paris, 2013, pp. 1-2).

Pada dasarnya, Amerika Serikat telah menyebutkan mengenai diplomasi digital *21<sup>st</sup> Century Statecraft* yang dikembangkan di bawah pengawasan Hillary Clinton di hari pertamanya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Seperti yang diungkapkan oleh Clinton

bahwa: “Kami telah mengadaptasi pengelolaan negara kami dengan membentuk kembali pengembangan dan agenda diplomatik untuk mempertemukan tantangan lama dengan cara yang baru dan dengan menyebarkan aset inovasi terbaik Amerika. Ini adalah *21<sup>st</sup> Century Statecraft*: pelengkap bagi kebijakan luar negeri tradisional dengan instrumen yang telah diadaptasi dan diinovasi yang mampu memberikan pengaruh bagi jaringan, teknologi, dan demografi di dunia yang saling berhubungan” (Kersaint, 2013, p. 174)

Kebijakan *21<sup>st</sup> Century Statecraft* ini merupakan usaha Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam melaksanakan komitmen Obama mengenai transparansi di pemerintahan dan untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah di luar negeri melalui penggunaan teknologi baru dan alat diplomasi tradisional untuk mendorong pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel (USA, 2010, p. 65).

Tindakan ini sesuai dengan komitmen Obama di hari pertamanya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dengan menandatangani memorandum “*Transparency and Open Government*” (*Transparency and Open Government: Memorandum for the Heads of Executive Department Agencies*) yang di dalamnya tercantum bahwa teknologi Web 2.0 merupakan sebuah kebutuhan untuk masuk ke dalam pengetahuan yang lebih luas di berbagai komunitas di dunia (Dale, 2010, p. 4). Hal ini menjadi sangat jelas

bahwa pemerintahan Obama memiliki keinginan untuk memasuki pengetahuan dari masyarakat di berbagai penjuru dunia.

*21<sup>st</sup> Century Statecraft* mempunyai tujuan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah pendekatan diplomasi tradisional yang bersifat *top-down* menjadi berpusat kepada warga dan pemberdayaan bisnis (Kersaint, 2013, p. 174) membuat lebih banyak hubungan dengan masyarakat internasional dan mendapatkan respon secepat mungkin dari masyarakat melalui media sosial (Chinn, 2011, p. 1). Dalam konteks ini, Departemen Luar Negeri melaporkan telah menggeser stafnya ke arah penggunaan media sosial seperti Twitter, YouTube, dan Facebook.

Negara mendedikasikan sebuah situs web kompleks yang secara menyeluruh sebagai inisiatif untuk *21<sup>st</sup> Century Statecraft* dan berbagai dimensinya: kebebasan internet di dunia dan pembinaan *Civil Society 2.0* sebagai cara untuk memperkuat masyarakat sipil yang difasilitasi oleh teknologi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan peningkatan pelayanan publik, stabilitas, dan keamanan. Kemudian, upaya ini juga bertujuan untuk mengabdikan inovasi melalui kelembagaan penyedia pelatihan termasuk di dalamnya penanganan media (Kersaint, 2013, pp. 174-175).

*21<sup>st</sup> Century Statecraft* menjadi pendekatan bagi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk merangkul teknologi dan alat baru serta menggunakannya untuk berhubungan dengan pendengar baru, khususnya masyarakat sipil. Revolusi di bidang teknologi konektivitas—termasuk di dalamnya internet, SMS, media sosial, dan meningkatnya aplikasi *mobile* yang semakin canggih dan telah diakses lebih dari 4.6 milyar telepon genggam yang digunakan saat ini— telah memberikan manusia alat baru untuk menyerukan dan membuka cakrawala baru bagi diplomasi. Teknologi tersebut menjadi *platform* untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berdagang di abad ke-21. Dan yang lebih penting, teknologi telah menghubungkan masyarakat ke masyarakat, pengetahuan, dan jaringan global (USA, 2010, p. 65).

Dalam implementasinya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menggunakan bentuk komunikasi baru ini pada level kedutaan dan pemerintah pusat di Washington. Di satu sisi kedutaan berupaya untuk merangkul media sosial dengan menargetkan pendengar melalui ketertarikan publik. Dan di sisi lain, pemerintah pusat membuat forum-forum, di mana para pengguna dapat berinteraksi dengan pejabat pemerintah dengan mem-*posting* pandangan mereka pada isu-isu diplomasi, bertanya mengenai aktor pemerintah dan *citizen* lain. Departemen-departemen di D.C. dan kedutaan besar di

berbagai negara dinilai sebagai pemimpin dalam menggunakan media sosial untuk kepentingan pemerintahan (Chinn, 2011, p. 2).

Di masa pemerintahannya, Obama telah mencerminkan beberapa perubahan besar dalam bidang digital, di mana publik dapat mengkonsumsi berita dan informasi serta terlibat dengan dunia sekitar secara *online*. Pada tahun 2009, selain meluncurkan *Whitehouse.gov*, RSS dan email, pemerintah Obama juga bergabung ke media sosial lainnya dengan memiliki akun di Facebook, Twitter, Flickr, Vimeo, iTunes, dan bahkan MySpace. Pada tahun 2011, pemerintah Obama juga meluncurkan *We the People*, sebuah *platform* bagi warga Amerika Serikat untuk mengajukan petisi ke Gedung Putih.

Pada tahun 2013, Ibu Negara mem-*posting* foto pertamanya di Instagram. Pada tahun 2015, Presiden Obama mengirim *tweet* pertamanya melalui akun @POTUS. Pada tahun 2016, Gedung Putih mulai mengirim cerita resmi melalui Snapchat. Dengan demikian, saluran digital yang merupakan aset ini tidak hanya dimiliki presiden ke depannya, tetapi juga untuk masa presiden setelahnya. Dan hal ini tentu juga milik rakyat Amerika Serikat (Gov, 2016).

Selama Obama menjabat sebagai presiden dan Hillary Clinton menjabat sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat, banyak program yang telah dilakukan sesuai dengan *21<sup>st</sup> Statecraft* dan mengaitkan hal tersebut dengan hubungan diplomasi dengan negara

lain tidak terkecuali Iran. Ada beberapa program yang berhubungan langsung dengan dinamika diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran seperti program “*Nowruz Video*” dimana Presiden Obama merilis sebuah video di YouTube pada bulan Maret, yang menampilkan dirinya berbicara secara langsung kepada publik dan pemimin Iran pada peringatan Nowruz, perayaan Tahun Baru Iran. Obama juga menyebutkan mengenai sejarah hubungan Amerika Serikat-Iran yang bergejolak dan menyambut ‘awal yang baru’ dengan Iran. Video tersebut telah dilihat lebih dari 100.000 kali dan diterima dengan baik di Iran.

Selain itu ada juga program “*Twitter in Iran*” dimana Pada bulan Juni terjadi kasus penculikan terhadap ribuan warga Iran yang menentang pemerintah setempat telah menyebabkan rakyat Iran menyebarkan seruan, gambar, dan video melalui *platform* Twitter untuk menentang penindasan yang telah dilakukan oleh pemerintah mereka yang sebelumnya telah mengontrol media tradisional. Tindakan tersebut mendapatkan bantuan langsung dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai upaya mendukung kebebasan informasi. Seperti yang diungkapkan oleh Jared Cohen yang berkerja sama dengan Alec Ross dengan menghubungi Jack Dorsey dari Twitter untuk tidak membungkam demonstiran Iran yang *online* di platform tersebut.

Setelah Obama dilengserkan dari jabatannya dan digantikan oleh Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, Donald Trump menggunakan Twitter untuk mengkritik media yang menurutnya merugikan maupun menentang perusahaan yang mengalihkan lapangan kerja ke luar negeri, dan membela dirinya terkait pembicaraan telepon dengan pemimpin dunia yang kontroversial.

Namun sebenarnya Donald Trump telah menggunakan Twitter sebelum menjabat sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, dimana Trump menggunakan akun Twitternya untuk mempromosikan dirinya dan bisnisnya. Bukan hanya itu Akun Twitternya juga digunakan untuk mengkritik partai yang tidak sesuai dengan persepsinya bahkan pada tahun 2015 Trump menggunakan akun Twitternya untuk mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden Amerika pada pemilu 2016. Setelah menjabat sebagai presiden Amerika Serikat menggantikan posisi Barrack Obama, Donald Trump memilih Twitter sebagai media andalannya dibandingkan dengan media lainnya dalam melakukan berbagai hal (Harris, 2016).

Pada 27 Desember 2019, muncul ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kala milisi Hizbullah di Irak yang dikatakan AS disokong dan oleh Iran, menyerang basis militer Amerika Serikat di Krikuk. Serangan Hizbullah menggunakan lebih dari 30 roket ke arah kawasan minyak di utara Baghdad. Akibat serangan itu warga AS yang bekerja sebagai kontraktor tewas. Selain itu, empat petugas AS

terluka, seorang personel keamanan Irak juga terluka. Hal ini diketahui dari keterangan Pentagon. Hal ini membuat AS melakukan serangan balik terhadap pangkalan milisi Kataib Hizbullah di Irak. Pada 29 Desember AS menyebutnya sebagai aksi pertahanan. Dalam serangan tersebut setidaknya 25 pejuang misil tewas, dan 55 lainnya mengalami luka.

Namun, serangan AS membuat Irak kecewa. Pasalnya serangan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut. akibat konflik ini, Irak mengatakan akan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan koalisi internasional yang dipimpin oleh AS untuk melawan negara islam (ISIS). Ini ditegaskan Dewan Keamanan Nasional Irak dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya presiden AS Donald Trump menyalahkan Iran atas serangan AS ke Irak. Pasalnya serangan AS ke pangkalan milisi Hizbullah di Irak, terjadi karena pasukan itu didukung penuh oleh Iran. Iran dituding membiayai pasukan Hizbullah. Serangan itu merupakan pembalasan atas serangan rudal yang menewaskan warga AS di Irak bagian utara. Iran membantah AS. Iran pun menyangkan serangan AS pada Hizbullah karena kelompok itu selama ini membantu menggempur ISIS di Irak.

Melihat tidak adanya jalan keluar dari permasalahan ini, presiden Amerika Serikat pun mengeluarkan pernyataan bernada

ancaman melalui Twitternya. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menargetkan 52 lokasi Iran. Mereka akan menyerang jika Iran menyerang warga Amerika Serikat ataupun asetnya (Mangkuto, 2020).

Berdasarkan fakta di atas, penulis tertarik untuk mengulas dan meneliti lebih jauh mengenai penggunaan media sosial Twitter sebagai sarana diplomasi Amerika Serikat dalam hubungan diplomasinya terhadap Iran dengan judul **“Media Sosial Sebagai Sarana Diplomasi Suatu Negara (Studi kasus: Penggunaan Twitter oleh Presiden Donald Trump dalam Hubungan Diplomasi AS-Iran)”**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis akan mengkaji penggunaan media sosial twitter oleh presiden Donald Trump dalam hubungan diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran dan keterkaitannya dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang terjadi beberapa bulan yang lalu di tahun 2019 yang digadang akan memicu World War III. Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk diplomasi yang dilakukan AS dalam menangani konflik terhadap Iran?
2. Bagaimana dampak penggunaan diplomasi Twitter dalam hubungan diplomasi AS-Iran?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk diplomasi yang dilakukan AS dalam menangani konflik terhadap Iran.
- b. Untuk mengetahui dampak penggunaan diplomasi Twitter dalam hubungan diplomasi AS-Iran.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional pada khususnya dan pemerhati masalah-masalah internasional

pada umumnya mengenai diplomasi suatu negara, khususnya masalah media sosial sebagai alat diplomasi kontemporer.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku diplomasi dalam melakukan kegiatan diplomasi khususnya yang menyangkut dengan media sosial yang digunakan sebagai alat diplomasi suatu negara.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Konsep Diplomasi Digital**

Sebelumnya membahas tentang diplomasi digital, penulis akan menjelaskan secara singkat tentang diplomasi. Pada tataran ini diplomasi digunakan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara baik itu Amerika Serikat maupun Iran.

Menurut Harold Nicholson, Diplomasi adalah:

*the management of international relation by negotiation; the method by which these relation are adjusted and manage by ambassadors and envoys; the business or art of the diplomatist.* (pengaturan dari hubungan internasional dengan menggunakan negosiasi; metode dari hubungan ini disesuaikan dan dikelola oleh Duta besar dan utusannya; merupakan bisnis atau seni dari diplomatis) (Nicholson, 1974).

Semakin kuat suatu negara dalam arti tingkat kemajuan dan kemakmuran, maka negara itu makin dipercaya, dihargai dan diperhitungkan dalam percaturan internasional yang otomatis

mendukung suatu upaya diplomasi. Diplomasi pada hakekatnya merupakan praktek komunikasi antar negara dalam merundingkan berbagai kepentingan permasalahan, baik itu yang sifatnya dua negara (bilateral) maupun banya negara (multilateral).

Ada berbagai ragam diplomasi (Shoelhi, 2001, p. 7), yaitu:

1. Diplomasi Borjuis-Sipil, merupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahannya lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan (*win-win solution*)
2. Diplomasi Demokratis, diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memerhatikan suara masyarakat.
3. Diplomasi Totaliter, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara (pemujaan patriotism dan loyalitas kepada negara berapa pun harga pengorbanannya). Diplomasi ini marak pada fasisme italia, fasisme spanyol, dan nazi jerman.
4. Diplomasi preventif, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang bakal memunculkan konflik besar atau pecah perang,
5. Diplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.
6. Diplomasi Perjuangan, diperlukan satu negara menghadapi situasi genting untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan

hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan negara

7. Diplomasi Multilajur (*Multitrack Diplomacy*), merupakan diplomasi total yang dilakukan oleh suatu negara dimana penggunaan seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.
8. Diplomasi Publik (*Softpower Diplomacy*), diplomasi ini menekankan gagasan alternative penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme.

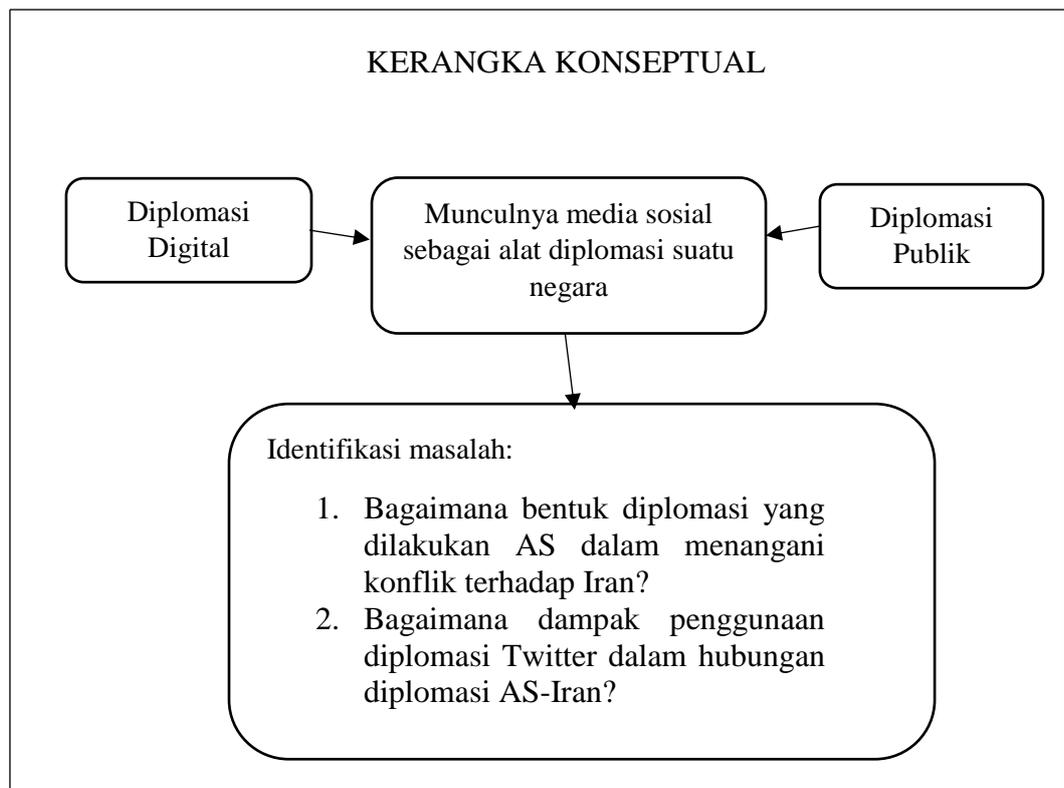
Selain dari berbagai jenis konsep diplomasi diatas, ada juga jenis diplomasi yang lebih menekankan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yakni konsep diplomasi digital dan dalam perkembangan diplomasi ini muncul diplomasi yang lebih spesifik pada penggunaan media sosial Twitter yaitu diplomasi Twitter atau sering disebut dengan *Twiplomacy*. Diplomasi Twitter mengacu pada penggunaan jaringan sosial dan situs web microblog Twitter oleh kepala negara, pemimpin organisasi internasional, dan diplomatnya untuk melakukan penjangkauan diplomatik dan diplomasi public.

## **2. Konsep tentang Diplomasi Publik**

Selain diplomasi digital yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis juga akan menggunakan konsep diplomasi publik dalam mengolah data pada penelitian ini. konsep diplomasi publik sudah dijelaskan sedikit pada

poin no.8 penjelasan sebelumnya. Dimana diplomasi publik ini lebih menekankan pada penyelesaian masalah dengan jalan damai tanpa ada gerakan militerisasi.

Konsep diplomasi publik yang digunakan oleh penulis lebih menekankan pada penggunaan media sosial dalam seluruh aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh negara baik itu Amerika Serikat maupun Iran. Selain aktivitas diplomasi, penulis akan menggunakan konsep ini dalam melihat pengaruh atau dampak yang diberikan oleh diplomasi digital dan diplomasi publik terhadap pembuatan suatu kebijakan oleh negara yang bersangkutan.



*Gambar 1. Kerangka konseptual*

Dalam rancangan penelitian ini, penulis memilih dua konsep tersebut untuk menganalisis isu dan pembahasan yang akan dipaparkan pada bab selanjutnya. Konsep diplomasi digital digunakan untuk menganalisis munculnya media sosial sebagai alat diplomasi kekinian, dan konsep diplomasi publik digunakan untuk menganalisis dampak dari penggunaan media sosial dalam segala aktivitas diplomasi dan pembuatan kebijakan oleh negara Amerika Serikat dan Iran.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang konflik yang terjadi di AS dan Iran serta penggunaan media sosial Twitter dalam hubungan diplomasi AS dan Iran.

### **b. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, surat kabar, dan informasi yang diakses dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis akan melakukan studi literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, artikel, dokumen dari berbagai media baik elektronik maupun non elektronik yang bertempat

pada perpustakaan pusat kampus Universitas Hasanuddin. Selain itu, peneliti juga akan berfokus pada salah satu media sosial yakni Twitter, khususnya pada akun Twitter presiden Donald Trump yang akan menjadi patokan penelitian ini.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan teknik analisis data hasil penelitian dengan teknik analisis data kualitatif. Penulis akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, diplomasi yang digunakan Amerika Serikat dalam menangani kasus ini, dan dampak yang diberikan dari penggunaan diplomasi tersebut terhadap masyarakat domestik dan luar negeri. Kemudian setelah itu menganalisis data tersebut dengan menggunakan konsep diplomasi digital dan diplomasi publik.

#### **e. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan ialah metode deduktif, yaitu memulai dengan menganalisis permasalahan umum penelitian dengan teori dan konsep, kemudian merumuskan hipotesa berdasarkan teori dan konsep yang digunakan, mengumpulkan data spesifik untuk menguji hipotesa dan menganalisis hasil uji hipotesa. Kemudian menarik kesimpulan secara umum dalam menjelaskan hasil analisis data dalam penulisan ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Tentang Diplomasi Digital**

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi inilah sebuah negara dapat membangun citra dalam dirinya. Dalam hubungan antarnegara, pada umumnya diplomasi dikembangkan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Sir Ernest Satow sejak 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelegen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antar pemerintah yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya (Satow, 1922). Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharanya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung (Watson, 1984, p. 1).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan

kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional.

Inti dari diplomasi adalah kesediaan untuk memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua negara (bilateral) atau tiga negara (trilateral), atau beberapa negara (multilateral). Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antarpemerintah negara, namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar-lembaga informal atau antar-penduduk atau antar-komunitas dari berbagai negara yang berbeda. Idealnya, diplomasi haruslah memberikan hasil berupa pengertian yang lebih baik atau persetujuan tentang suatu masalah yang dirundingkan.

Diplomasi kini mengalami evolusi dari serangkaian modifikasi sejak pertama kali ditemukan di era klasik (*first track diplomacy*), kebutuhan akan interaksi diluar batas negara kini tidak lagi memihak kepada mereka yang memegang jabatan tertinggi dari suatu negara seperti presiden, raja, kaisar, menteri, dsb. Akan tetapi perilaku diplomasi berkembang menjadi satu aktifitas umum yang juga diperuntukkan kepada mereka dari setiap elemen masyarakat yang memang harus melakukan aktifitas diplomasi. Pada akhirnya cabang ilmu dari diplomasi kini terbagi menjadi bagian-bagian yang substansinya disesuaikan dengan cara pandang sekaligus tujuan konteks diplomasi di bidang tertentu dan salah satunya adalah diplomasi digital.

Para pakar dengan suara bulat setuju bahwa asal mula diplomasi digital dapat ditelusuri hingga Amerika Serikat. Lebih spesifik lagi, mereka mengakui cara mantan sekretaris negara, Hillary Clinton, mampu membentuk strategi kebijakan luar negeri untuk mengeksploitasi teknologi baru. Selama masa jabatannya sebagai sekretaris negara, Clinton menjadikan media sosial sebagai integral dari banyak program yang dijalankan departemen luar negeri (DOS/ *Departement of State*).

Berupaya memanfaatkan tren baru yang populer ini sebagai alat kenegaraan. Dengan kata-katanya sendiri, Clinton ingin menjalankan program kenegaraan 213 abad yang akan “menjangkau di luar hubungan pemerintah tradisional dan berhubungan langsung dengan masyarakat di seluruh dunia” (Holmes, 2015). Dedikasinya untuk memprioritaskan diplomasi digital diperlihatkan oleh fakta bahwa “DOS” saat ini memiliki 25 node yang berada di kantor pusatnya yang berfokus pada diplomasi digital, dengan lebih dari 1.000 karyawan yang menggunakannya dalam pekerjaan mereka di rumah dan di luar negeri (Sandre, 2013) untuk memonitor informasi yang diposting secara online sehingga bisa mengubah pesan-pesannya untuk menanggapi opini public, dan memantau Twitter menghasilkan lebih dari 100 bahasa. (Zhang, 2013)

Dunia diplomasi terkenal dengan nuansa rahasia dan tertutup. Interaksi antara pelaku diplomasi dan masyarakat awam terbatas pada pertemuan tatap muka maupun melalui berita di media tradisional seperti koran dan televisi. Kini perkembangan dunia digital termasuk medsos

mendorong semangat keterbukaan dan transparansi serta menciptakan sumber paradigma baru dalam praktik diplomasi. Oleh karena itu, para pelaku diplomasi dituntut untuk mampu memberikan dengan cepat, tepat dan benar.

Menyadari pentingnya medsos sebagai forum aspirasi, komunikasi dan partisipasi para internet citizen (*netizen*), banyak kementerian luar negeri, kedutaan dan konsulat di dunia telah mengadopsi penggunaan media sosial sebagai alat diplomasi dengan membuka akun resmi pada Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Dari perkembangan tersebut muncullah bidang diplomasi baru yakni diplomasi digital.

Terlepas dari berbagai kritik terkait media sosial, penerapan medsos pada diplomasi diakui telah mengubah politik internasional signifikan. Pengembangan platform seperti Twitter secara radikal telah mengubah cara masyarakat bereaksi dan berfikir tentang hubungan internasional selama dekade terakhir.

Pengaruh media sosial dalam konteks diplomatik tercerminkan dalam beberapa peristiwa penting di dunia. Seperti Twitter sukses menjadikan tagar(*hashtag*) *#BringOurGirlBack* menjadi viral di seluruh dunia sebagai bentuk dukungan masyarakat dunia terhadap peristiwa penculikan siswi Chibok oleh Boko Haram di Nigeria. Contoh tersebut mencerminkan popularitas pembahasan masalah geopolitik internasional di media sosial. (Nurmala N. , 2018)

Sejak peluncurannya 10 tahun silam, Twitter telah mengalami evolusi yang cukup signifikan. Twitter tak lagi digunakan sebagai media sosial, tetapi juga media untuk berdiplomasi. Banyak pemimpin negara yang menggunakan Twitter untuk menyapa masyarakat ataupun mempromosikan pencapaiannya. Twitter sebagai alat diplomasi juga bisa dilakukan melalui penciptaan *trending topic*. Cuitan dengan tanda pagar (#) atau *hashtag* dengan nama #JokowidiKorea dan #JokowiblusukanSeoul masing-masing secara berurutan berhasil melesat menjadi topik yang terhangat di Twitter. Banyak diplomat sudah merasakan bagaimana Twitter sangat membantu kinerja mereka.

Twitter terbukti memberikan keuntungan untuk diplomasi. Para pemimpin dunia pun banyak yang menggunakan Twitter untuk menyapa dunia. Menurut *twiplomacy.com*, sebuah situs web yang melihat aktivitas pemimpin suatu negara di media sosial, tercatat ada 793 akun Twitter resmi milik pemerintah dan kepala negara di 173 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan total pengikut mencapai 325 juta. Baru-baru ini di tahun 2016, *twiplomacy.com* mengeluarkan hasil riset terhadap jumlah pengikut para pemimpin negara yang ada di dunia. Selain jumlah pengikut, *twiplomacy* juga merilis mengenai pengaruh pemimpin negara di Twitter. Untuk melihat pengaruh tersebut, *twiplomacy* menggunakan jumlah *tweets* para pemimpin dunia yang di *re-tweet* oleh *followers*. (Mantolas, 2016)

## **B. Konsep Tentang Diplomasi Publik**

Diplomasi publik didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi secara luas itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya pemerintah untuk melakukan politik luar negeri dan memajukan kepentingan nasional secara langsung penjangkauan dan komunikasi dengan penduduk negara asing. Kegiatan diplomasi publik termasuk memberikan informasi kepada publik asing melalui media penyiaran dan internet dan di perpustakaan dan fasilitas penjangkauan lainnya di luar negeri; melakukan diplomasi budaya, seperti pameran seni dan pertunjukan musik; dan menyelenggarakan pendidikan dan profesional internasional program pertukaran.

Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media dalam pelaksanaan diplomasi publik. Media sosial adalah “ media online, dimana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual” (Djelantik, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh *We Are Social* menemukan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 23 menit untuk mengakses media sosial (Badan Litbang Kemendagri, 2018).

Telah banyak contoh yang memperlihatkan peran media sosial dalam menyokong keberhasilan sebuah kegiatan; seperti keberhasilan Barrack Obama dalam memenangkan pemilu di Amerika Serikat yang dihubungkan dengan aktivitas tim kampanyenya melalui media sosial Facebook (Sukmaputri, 2016). Disini terlihat indikasi bahwa penggunaan

media sosial yang efektif dapat membantu tersampainya pesan dengan ruang lingkup yang luas, tanpa harus melakukan kunjungan langsung sebuah tempat dan melakukan interaksi fisik dengan masyarakat tertentu.

Contoh lain dari fungsi dari media sosial adalah peristiwa *Arab Spring* yang disinyalir sebagai bukti berhasilnya penyebaran ideologi melalui media sosial seperti Twitter (Djelantik, 2017). Sekali lagi terlihat bukti bahwa ide dan gagasan dapat disebarkan dengan mudah melalui media sosial, sehingga menggalang opini masyarakat tidak berfokus pada kunjungan fisik yang lebih memakan waktu, tenaga dan biaya. (Sofia Trisni, 2018)

Amerika Serikat telah lama berusaha mempengaruhi orang asing negara melalui diplomasi publik. Setelah Perang Dunia II, di mana militer AS melakukan sebagian besar kegiatan informasi dan komunikasi, kewenangan untuk diplomasi publik AS ditempatkan di tangan sipil. Selama Perang Dingin, Badan Informasi Amerika Serikat (USIA) memimpin upaya diplomasi publik AS, dengan misi utama memerangi propaganda dan Soviet penyebaran komunisme. Setelah Uni Soviet dibubarkan pada tahun 1991, peran USIA berkurang, dan sumber dayanya berkurang selama tahun 1990-an. Akhirnya, USIA dihapuskan pada tahun 1999 sebagai bagian dari reorganisasi pasca-Perang Dingin, dengan tanggung jawab diplomasi publik dilipat ke dalam Departemen negara.

Pasca serangan teror 9/11, muncul minat baru untuk mempromosikan diplomasi publik yang efektif, sebagai Perjuangan

melawan ideologi ekstremis menjadi penting dalam perang melawan terorisme secara keseluruhan. Di beberapa tahun terakhir, banyak pengamat telah menyerukan peningkatan sumber daya dan perbaikan AS upaya diplomasi publik. Sejumlah tantangan dan pertanyaan, bagaimanapun, saat ini mempengaruhi masa depan komunikasi pemerintah AS dengan publik asing.

Beberapa berpendapat bahwa menghapus USIA adalah sebuah kesalahan dan bahwa Departemen Luar Negeri tidak cocok untuk melakukan publik jangka panjang diplomasi. Selain itu, Departemen Pertahanan dan militer AS telah meningkat secara signifikan peran mereka dalam berkomunikasi dengan publik asing. Menentukan peran diplomasi publik, tanggung jawab, dan prosedur koordinasi antara aktor sipil dan militer karenanya menjadi isu sentral. Selain itu, dengan kebangkitan dan evolusi yang cepat dari komunikasi internet, pemerintah AS harus menentukan bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan publik asing di lingkungan komunikasi global yang semakin kompleks, mudah diakses, dan demokratis.

Sejumlah masalah Kongres telah muncul terkait diplomasi publik AS. Menentukan tingkat pendanaan diplomasi publik, untuk program dan personel, akan terus menjadi pusat pentingnya. Menetapkan kemampuan untuk meningkatkan pemantauan dan penilaian diplomasi publik kegiatan, serta untuk meningkatkan keahlian dan praktik terbaik di luar pemerintah, mungkin penting untuk meningkatkan efektivitas diplomasi publik.

Pertanyaan tentang kemungkinan reorganisasi otoritas dan kemampuan diplomasi publik, melalui undang-undang atau sebaliknya, mungkin dipertimbangkan.

Persyaratan untuk kerjasama dan koordinasi antarlembaga yang efektif, serta penciptaan strategi diplomasi publik nasional dan pendekatan seluruh pemerintah mungkin diciptakan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dengan publik asing. Beberapa undang-undang sejauh ini diusulkan dalam Kongres ke 111 tentang perubahan, perbaikan, dan pendanaan untuk diplomasi publik. RUU ini antara lain HR 2647 dan S. 1707, yang telah disahkan menjadi undang-undang, serta HR 363, HR 489, HR 490, HR 2387, HR 2410, S. 230, dan S. 894. Pertimbangan Kongres atas RUU ini, dan minat berkelanjutan dalam diplomasi publik AS, adalah diharapkan untuk berlanjut selama sesi kedua Kongres ke-111.